

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA APARATUR DESA KOTA
KANDIS DAN DESA JATI MULYO KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Syariah**



Oleh:

**FIBRI AGUSTI NINGSIH
NIM. 105180182**

Pembimbing:

**Dr.Siti Marlina, S.Ag., M.HI
Abdul Razak, S.H.I., M.I.S**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022**

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA APARATUR DESA KOTA
KANDIS DAN DESA JATI MULYO KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Syariah**



Oleh:

**FIBRI AGUSTI NINGSIH
NIM. 105180182**

Pembimbing:

**Dr.Siti Marlina, S.Ag., M.HI
Abdul Razak, S.H.I., M.I.S**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan asli hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 26 Juli 2022
Yang Menyatakan,



Agusti Ningsih
NIM. 105180182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Analisis Perbedaan Kinerja Aparatur Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 26 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Agustus 2022

Mengesahkan:



Panitia Ujian :		
Ketua Sidang	: <u>Drs. Rahmadi, M.H</u> NIP. 196611121993021001	(.....)
Sekretaris Sidang	: <u>Drs. A. Asnawi LS</u> NIP. 196311111992011001	(.....)
Penguji I	: <u>Dr. H. Kholil Syaib, M.Ag</u> NIP. 19207032007101003	(.....)
Penguji II	: <u>Khairun Najib, M.I.P</u> NIP. 201111880	(.....)
Pembimbing I	: <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H</u> NIP. 197502212007012015	(.....)
Pembimbing II	: <u>Abdul Razak, S.H.I., M.I.</u> NIP. 198002072009011007	(.....)

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُوفِّيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

(QS. Al-Ahqaaf Ayat 19).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin dengan Rahmat Allah SWT saya telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan ini saya persembahkan keberhasilan ini Terutama kedua Superheroku tercinta, Bapak ku Supono dan Mama ku Sri Wulan terimakasih atas limpahan kasih sayang, support, dan yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk neng, sehingga neng dapat sampai ketitik ini.

Yang kedua untuk diri saya sendiri yang telah bertahan sampai sejauh ini, terimakasih sudah kuat, terimakasih sudah mau melawan rasa malas, bekerja keras dan terus mencoba meskipun terkadang tidak sesuai harapan, tapi kamu hebat, kamu kuat dan kamu mampu melewati segalanya, ini bukan akhir, namun langkah awal dalam perjuangan yang lebih nyata.

Dan yang ketiga untuk abang ku Eka Suprpto,S.Pt, mbak ipar Aydilla Fitri, dan keponakanku Arshaka, terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi untuk neng. Ku persembahkan karyaku ini sebagai bukti tanggung jawabku kepada kedua orang tuaku yang sangat ku cintai, keluarga, dosen pembimbing, sahabat-sahabat dan orang-orang baik yang ada di dalam hidupku Terima kasih atas doa, bimbingan, motivasi dan bantuannya, Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, Aamiin

ABSTRAK

Nama : Fibri Agusti Ningsih
NIM : 105180182
Judul : Analisis Perbedaan Kinerja Aparatur Desa Kota Kandis Dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem kerja dari aparatur desa kota kandis dendang dan aparatur desa jadi mulyo, serta kendala apa yang mempengaruhi dalam mencapai target kinerja aparatur desa, dan bagaimana analisis kinerja di kedua desa tersebut. Jenis penelitian skripsi ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan : Faktor penghambat/kendala dalam mencapai kinerja aparatur untuk desa Kota Kandis Dendang kendala seperti kurangnya disiplin aparatur desa yang masuk jam kerja tidak tepat waktu yang ditentukan, kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kerja para aparatur sehingga proses pelayanan kurang optimal, karena Kepala Desa juga yang kurang peduli dan a wear terhadap aparturnya menjadi kendala utama, namun dalam memberikan pelayanan para aparatur cukup baik dilihat dari respon masyarakat dalam penanganan yang cepat tanggap dan ramah dalam melayani, sedangkan untuk Jati Mulyo rasa malas yang ada pada individu tersebut, dalam hal ini perlunya sanksi yang tegas yang perlu diberikan kepada para aparatur desa ketika melakukan kesalahan, kinerja dari kepala desa yang selalu siap dan memayungi para aparatur desa, dalam hal ini perlunya hubungan sosial yang baik antara masyarakat dengan aparatur, maupun aparatur desa dengan kepala desa.

Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Desa

ABSTRACT

Name : *Fibri Agusti Ningsih*

NIM : *105180182*

Title : *Analysis Of Differences In The Performance Of The Village Apparatus, Kota Kandis Dendang and Jati Mulyo Village, Dendang District, Tanjung Jabung Regency, East Jambi Province.*

This thesis aims to determine the working system of the Kandis Dendang city village apparatus and the Jati Mulyo village apparatus, as well as what obstacles affect the achievement of the performance targets of the village apparatus, and how to analyze the performance in the two villages. This research type is descriptive qualitative with data collection obtained through interviews, observation, and documentation. Based on the research conducted by the author, the results and conclusions obtained are: Inhibiting factors / obstacles in achieving apparatus performance for the village of Kandis Dendang City, obstacles such as the lack of discipline of village officials who enter working hours not on the specified time, lack of facilities and infrastructure to support the work of the apparatus so that the service process is less than optimal, because the village head is also the one who doesn't care and wears his apparatus the main obstacle, while for Jati Mulyo the feeling of laziness that exists in the individual, in this case the need for strict sanctions that need to be given to village officials when doing mistakes, the performance of the village head who is always ready and an umbrella for the village apparatus, in this case the need for good social relations between the community and the apparatus, as well as the village apparatus and the village head.

Keywords: *Performance, Village Apparatus*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan sholawat beriringi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Ssaifuddin Jambi. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data atau penyusunannya, dengan terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan, serta motivasi berbagai pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Thi., M.A.,MIR sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.
6. Ibu Dr. Irmawati Sagala,S.IP., M.Si dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., selaku M.Hum Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Ibu Dr.Siti Marlina, S.Ag., M.HI dan Bapak Abdul Razak, S.H.I., M.I.S selaku pembimbing I dan pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, serta seluruh Karyawan/i dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Bapak dan Ibu pegawai Kantor Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo ikut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Saudari Rita Anjar Sari, Hersalina, Betty Elsa Wulandary, Derli Agustina, Anggi Indah K, Rethalia Nafisah, dan Dini Natasya yang selalu ada dalam keadaan apapun, Dan teman-teman kelas IP F, PPL, dan KKN angkatan 2018.

Di samping itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan Kritik dan Saran pemikirannya demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan yang ada didalam skripsi ini, semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Februari 2021



Fibri Agusti Ningsih

NIM. 105180182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	7
2. Jenis Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian	8
4. Jenis dan Sumber Data.....	9
5. Unit Analisis	10
6. Teknik Pengumpulan Data.....	10
7. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	16
A. Kerangka Pikir.....	16
1. Kerangka Teoritis.....	16
2. Kerangka Konseptual.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	31

A.	Sejarah Desa Kota Kandis	31
B.	Sejarah Desa Jati Mulyo	36
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	41
A.	Sistem Kerja Aparatur Desa	41
B.	Pelayanan Aparatur Desa Kota Kandis Dendang dan Jatimulyo	44
C.	Kendala dalam Kinerja Aparatur Desa	59
BAB V	PENUTUP	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Table 1 Jadwal Penelitian.....	15
Table 2 Sejarah Perkembangan Desa	31
Table 3 Data Jumlah dan Komposisi Penduduk Desa	33
Table 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	34
Table 5 Perkembangan Kepemimpinan Desa KKD.....	37
Table 6 Sejarah Pemerintahan Desa Jati Mulyo	38
Table 7 Informasi Geografis Desa Jati Mulyo	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Kota Kandis Dendang	35
Gambar 2. Struktur Organisasi BPD Desa Kota Kandis Dendang	36
Gambar 3. Struktur Organisasi Desa Jati Mulyo	40
Gambar 4. Struktur Organisasi BPD Jati Mulyo.....	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

DAFTAR SINGKATAN

FGD	: Fokus Group Discussion (Diskusi Kelompok)
HAM	: Hak Asasi Manusia
Kadus	: Kepala Dusun
Kades	: Kepala Desa
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
MPD	: Manajemen Pemerintahan Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ODF	: Open Defecation Free
Perda	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PP	: Peraturan Pemerintah
RKPDDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RT	: Rukun Tetangga
SDM	: Sumber Daya Manusia
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perangkat desa memiliki peran penting dalam kemajuan desa menuju terciptanya tata pemerintahan desa yang baik. Perangkat desa adalah penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sebagai unsur organik pemerintahan desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, unsur pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Tugas dan kewenangan adalah membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan serta membina dan memberdayakan masyarakat di desa.

Agar dapat membantu kepala desa dalam menjalankan tata pemerintahan, perangkat desa harus memiliki kompetensi kemampuan dan kemauan, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yaitu kompetensi dasar, manajemen, dan teknis.

Kemudian terdapat Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana sistem manajemen pemerintahan yang terfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang

berorientasi pada hasil atau outcome dikenal sebagai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP).¹

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Desa, ada tiga cara pembentukan desa: pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih, penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi satu desa, dan penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru. Desa kota kandis merupakan desa yang terbentuk dari tahun 1994 mendapatkan penghargaan sebagai desa ODF (Open Defecation Free) yakni desa yang memiliki komitmen dan mendeklarasikan untuk tidak buang besar di sembarang tempat, kemudian sebagai desa terbaik tingkat kabupaten, penghargaan dari Kementerian PPN/Bappenas dalam Program membangun desa.

Sedangkan, untuk Desa Jati Mulyo sendiri merupakan desa yang memiliki 15 RT dan 2 Dusun, yang sampai saat ini tercatat memiliki 8 orang Kepala Desa dari tahun 1980, dengan struktur pemerintahan 9 orang pegawai desa dan 5 orang anggota BPD berhasil diunjuk sebagai pilot projek desa sigap oleh Kabag OPI Polres Tanjung Jabung Timur Kopol Al-Hajat,S.IK. dari kedua desa tersebut dalam pelaksanaan pelayanan memiliki sistem kerja dalam pelayanan kepada masyarakat yang sama dan bagaimana para kepala desa dalam menjalankan tugas fungsinya dengan baik sehingga terciptalah kinerja para aparatur desa yang baik.

Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dihadapi oleh pemerintahan desa antara lain, masih banyaknya administrasi desa yang bersifat manual, belum di-back up dengan teknologi informasi. Beberapa tempat masih mengandalkan

¹ Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



administrasi menggunakan buku atau tulisan di papan sehingga belum terdokumentasikan dengan baik, sulitnya mengakomodir seluruh keinginan masyarakat.

Keterbatasan ini yang memunculkan minimnya sarana prasarana pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat desa, rendahnya kapasitas SDM kepala desa dan perangkat desa. Kompetensi kepala desa menjadi ujung tombak maju mundurnya sebuah desa. Permasalahan di sini adalah masih jarangny kepala desa yang masih kurang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbedaan Kinerja Aparatur Desa Kota Kandis Dendng dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.”

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian diatas maka peneliti menarik rumusan masalah yang akan peneliti angkat dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem kerja dari aparatur Desa Kota Kandis dengan Desa Jati Mulyo?
2. Bagaimana kinerja dari aparatur kedua desa tersebut?
3. Apa kendala aparatur desa dalam mencapai kinerja yang direncanakan?

C. Batasan Masalah

Agar isi dari penelitian ini tidak meluas dan mengambang, serta menginggat waktu, maka untuk mempermudah penelitian ini penulis akan membatasi masalah

yang akan dibahas dalam penelitian, maka kajian ini memiliki batasan pada perbedaan antara aparatur desa Kota Kandis Dendang dengan aparatur Desa Jati Mulyo tahun 2021. Lokasi penelitian di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang akan dicapai, sehingga tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Ingin mengetahui sistem kerja dari aparatur Desa Kota Kandis dengan Desa Jati Mulyo.
2. Ingin mengetahui kinerja dari aparatur kedua desa.
3. Ingin mengetahui kendala aparatur desa dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, dilihat dari:

1. Guna praktis bagi lembaga atau masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan problem mengenai perbandingan antara kinerja aparatur desa dengan desa.
2. Guna praktis tentunya dengan penelitian ini lembaga UIN dapat mengeksplorasi penelitian lebih lanjut kepada mahasiswa terhadap kinerja aparatur desa.
3. Guna akademis tentunya melalui penelitian ini peneliti dapat mengeksplorasi hasil penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai



kinerja setiap desa yang baik dan layak dalam bidang pelayanan public. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Strata Satu (S1) di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis membandingkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan dalam penulisan. Adapun penelitian sejenis yang pernah dilakukan mengenai Analisis Perbedaan Kinerja Aparatur Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mimi Asliani yang berjudul Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat izin Usaha (Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sarolangun), metode yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa krisis kepercayaan masyarakat paada birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih ada di era reformasi, dengan tuntutan yang lebih terhadap pelayanan publik yang selama ini dirasakan kurang dengan hal ini pemerintah mencari pemecahan masalah dengan terbentuknya PTSP.²
2. Skripsi yang ditulis oleh Solatiyah yang berjudul Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Studi Di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, metode yang

² Mimi Asliani, *Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha (Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sarlangun)*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN JAMBI, 2016.

digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa mengetahui kendala yang dihadapi kepala desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan upayanya meningkatkan pelayanan administrasi.³

3. Jurnal yang ditulis oleh Edi Darmawi, yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Perspektif Good Governance (Studi Deskriptif mengenai Kinerja Aparatur Kelurahan Ditinjau dari Dimensi Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas di Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif kualitatif, serta metode analisis data deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam kinerja yang baik dengan mengupayakan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat dengan mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas di dalam kinerja. Selain itu, perbedaan penulisan Edi Darmawi yakni Penulis skripsi ini sama-sama membahas tentang analisis kinerja aparatur kelurahan akan tetapi penulis sebelumnya hanya membahas sekitar kinerja aparatur kelurahan.⁴

Berdasarkan literature pada ketiga penelitian terdahulu diatas, terlihat adanya kesamaan dan perbedaan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Persamaanya terletak pada sudut pandang tentang kinerja Aparatur Desa. Ada pula kesamaan

³ Solatiah, Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Studi di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN JAMBI, 2020.

⁴ Edi Darmawi, *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Prespektif Good Governance*, (Seluma: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 2014), Vol 3 No 2, hlm. 6

dalam metode penelitian yakni Kualitatif. Untuk perbedaanya terletak pada lokasi dan waktu penelitian, serta fokus penelitiannya, yakni:

Untuk literature yang pertama, penelitian dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sarolangun, pada tahun 2016 dengan fokus penelitiannya lebih kepada pelayanan perizinan usaha di BPPTSP.

Untuk literature kedua, penelitian dilakukan di Kantor Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, pada tahun 2020 dengan fokus penelitiannya lebih kepada kinerja pegawai kantor desa dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat yakni pelayanan pembuatan pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pengantar Kartu Keluarga (KK), pengantar akte kelahiran, surat pindah, dan surat keterangan tidak mampu. Untuk literature ketiga, penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Napal, pada tahun 2014 fokus penelitiannya lebih kepada kinerja aparatur pemerintah aparatur kelurahan ditinjau dari dimensi akuntabilitas, responsibilitas dan responsivitas.

Sedangkan untuk penelitan penulis fokus penelitiannya lebih kepada analisis perbedaan kinerja dari dua desa berdasarkan teori A. Dwiyanto, yang meliputi produktivitas kerja, kualitas layanan, akuntabilitas, responsibitas, dan resposivitas di Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, yaitu di Kantor Desa Kota Kandis dan di Kantor Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, adapun objek penelitian ini ditekankan pada Aparatur Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo, yang melibatkan kepala desa dan masyarakat setempat guna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga akan sangat membantu bagi penulis dalam membuat skripsi ini.

b. Waktu Penelitian

Mengingat, menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan baik waktu, tenaga, pikiran, moral dan materil pada diri peneliti maka proses penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dari bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong, peneliiian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada subjek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara-cara terstruktur, terencana dan terprosedur untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan menggabungkan semua potensi dan sumber daya yang telah ada.⁵ Dengan pendekatan empiris

⁵ Edi Darmawi, *Analisis Kinerja...*, hal. 13.



4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian dengan metode deskriptif. Dalam tipe ini menggambarkan atau melukiskan secara rinci, sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki dari yang bersifat umum ke khusus. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan memperoleh data ataupun informasi langsung dengan instrumen yang telah disiapkan.⁶ Data yang termasuk dalam penelitian ini yakni data-data tentang bagaimana analisis perbedaan kinerja aparatur Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. sehingga dalam penelitian ini data primer yang terlibat yaitu: Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua BPD, serta Masyarakat.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder bersumber dari dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dokumentasi yang berkenaan dengan data gambaran umum mengenai Aparatur Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

⁶ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo), hlm. 34





b. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dan berupa data tambahan misalnya dokumen dan sebagainya. Sumber datanya yaitu orang dan materi-materi yang berhubungan langsung dengan tema penelitian ini yakni tentang Analisis Perbedaan Kinerja Aparatur Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

5. Unit Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis informan yakni satuan yang diteliti bisa berupa individu kelompok, benda atau suatu latar peristiwa. Sesuai judul penelitian ini, maka para informan penelitian yang dipilih diantaranya adalah masyarakat yang mewakili desa, Kepala Desa, dan Aparatur Desa. Dengan teknik purposive sampling atau teknik sampling non random.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan instrument untuk mendapatkan data utama yang diperoleh langsung di lapangan. Adapun teknik-teknik yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang observasi non partisipasi dan kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat di lapangan dan selama proses observasi ini berlangsung peneliti membuat catatan untuk keperluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

analisis dan pengecekan data kembali tentang Analisis Perbedaan Kinerja Aparatur Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan pertemuan dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi melalui tanya jawab dan mendapatkan data ataupun informasi yang dibutuhkan.⁸ Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan terstruktur yang mana pada subjek tersebut tahu bahwa mereka nanti akan diwawancarai dan mengerti apa maksud dan tujuan wawancara tersebut, serta terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan instrument wawancara yang akan peneliti pakai.

Adapun orang yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Husaini (Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang);
- 2) Slamet (Kepala Dusun Desa Kota Kandis Dendang);
- 3) Sri (Masyarakat Desa Kota Kandis Dendang);
- 4) Suwito (Ketua Badan Pegawai Desa);
- 5) Suyoto (Kepala Desa Jati Mulyo);
- 6) Haryanto (Sekretari Desa Jati Mulyo);

⁷ *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi : Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dan Syari'ah Press 2014) hlm.51

⁸ Imami Nur Rachmawati, 2007, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, (Indonesia: Jurnal Keperawatan Indonesia), Vol. 11 No. 1, hlm. 35



- 7) Riyanto (Kepala Dusun Desa Jati Mulyo);
- 8) Suwijo (Masyarakat);
- 9) Sumiati (Masyarakat);

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling mengetahui atau paham tentang apa yang kita harapkan. Sehingga, semua informan ini dipilih karena dianggap mereka dapat memberikan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang telah lalu berupa tulisan, gambar, ataupun suara. Dalam dokumentasi peneliti menetapkan dokumentasi yang berasal dari penulisan yang ada di Desa Kota Kandis Dendang maupun Desa Jati Mulyo. Untuk mengumpulkan data dari dokumentasi peneliti mencari data mengenai hal yang berupa catatan, gambar, buku, agenda dan sebagainya apapun yang dapat dijadikan sumber data untuk mendukung kesempurnaan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data bersifat deskriptif

⁹ Moh. Nazir, 1998. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 13

¹⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan RNB*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.137

yang artinya dalam penelitian ini menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan dengan se jelas-jelasnya dengan mendeskripsikan yang diperoleh di lapangan dengan sistematis. secara teknis dilaksanakan secara induktif yakni analisis yang dimulai dari pengolahan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pengolahan data meliputi memeriksa, proses pemberian identitas, pemberian nilai dan proses pembeberan. Pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan langsung yang berupa arsip, dokumen, gambar dan sebagainya yang kemudian diurutkan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dari teknik analisis data kualitatif, yang maksudnya penyederhanaan maupun pengolongan data yang penting dan membuang data yang tidak perlu, yang bertujuan untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan, serta dilakukan untuk pemilihan yang relevan atau tidak data dengan tujuan akhir penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data tereduksi atau disimpulkan kemudian data di display atau kegiatan menyusun data secara sistematis agar mudah untuk dipahami, sehingga akan memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan, bentuk penyajian ini bisa berupa catatan lapangan, grafik maupun bagan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”*.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Data yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi data yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data dengan tetap mengacu pada tujuan analisis akhir yang akan dicapai. Dengan tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, hubungan ataupun perbedaan untuk ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengelolaan data.



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian suatu gejala.¹¹

a. Kinerja

Menurut Agus Dwiyanto terdapat beberapa indikator dalam Kinerja yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yakni produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.¹²

1. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Dengan produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Kemudian, konsep produktivitas dirasa terlalu kecil dan sempit kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan berapa besar suatu pelayanan public itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Kualitas Layanan, jika membahas mengenai isu tentang kualitas layanan yang cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D"*, (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 81

¹²Sedarmayanti, *Manajemen Sumber..., hal. 8-9*

pelayanan public. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi pelayanan publik.

3. Responsivitas, yakni kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program pelayanan public sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi serta tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas, disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implicit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5. Akuntabilitas public menunjukkan besar kebijakan serta kegiatan dari organisasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public itu konsisten dengan keinginan masyarakat.

Hasil kerja tersebut yang dicapai oleh pegawai selanjutnya akan dibandingkan dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau tempat pegawai tersebut bekerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam

organisasi publik bersifat variatif artinya ada beberapa indikator sesuai dengan fokus dan penelitian.

b. Manajemen Pemerintahan Daerah

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan atau acuan teori Manajemen Pemerintahan Daerah yakni dimana proses pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perencanaan pemerintahan, pengorganisasian/ kelembagaan pemerintahan dan penggunaan sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tataran pemerintahan daerah.¹³ Menurut dalam Wsistiono terdapat 5 (lima) kecenderungan berbicara tentang Manajemen Pemerintahan yaitu, dilihat dari peranan pemerintah, dilihat dari visi dan misi desa atau daerah itu, dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, dilihat dari fungsi organisasi dan kepemimpinan yang ada di daerah atau desa tersebut. Menurut Surat Keputusan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur Pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
- b. Waktu Penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemeberian pelayanan.
- d. Produk pelayanan atau hasil dari pelayanan yang diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana yang memadai.

¹³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Makasar: Garis Khatulistiwa, 2020

- f. Kompetensi petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui, bagaimana kinerja sebuah organisasi, banyak para pakar berpendapat dengan menggunakan indikator dan konsep, seperti efektivitas, efisiensi dan juga produktivitas untuk menentukan sejauh mana kemampuan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Namun konsep dan indikator yang dikemukakan selalu saja hanya tepat digunakan bagi organisasi swasta yang berorientasi keuntungan belaka, hal ini ternyata berbeda dengan organisasi public yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat banyak tanpa mengejar keuntungan materi. Pelayanan public bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Karakteristik tersebut sesuai dengan UNDP yakni:

- a. Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- b. Rule of law kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa adanya perbedaan, terutama hukum HAM.
- c. Transparency yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
- d. Consensus orientation, good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
- e. Responsiveness, lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

- f. Effectiveness and efficiency yakni proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia.
- g. Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada public dan lembaga stakeholders.

Manajemen pemerintahan pada abad ke 21 akan lebih banyak menjalankan fungsi perencanaan yang bersifat strategi sedangkan fungsi yang bersifat taktis dan operasional dibuat oleh masyarakat. Untuk dapat menyusun perencanaan yang strategik organisasi pemerintah perlu didukung oleh pegawai yang memiliki wawasan luas dan jangkauan pandangan ke masa depan. Gaya kepemimpinan yang digunakan akan cenderung berbentuk egaliter dan demokratis. Hubungan antara pemimpin dan pengikutnya lebih bersifat heterarkhis dari pada hirarkis. Seperti yang dikatakan oleh Clinton (dalam Wasistiono 2001) penyelenggaraan pemerintahan yang dikreasikan sebagai instrument kepentingan masyarakat kembali pada nilai-nilai fundamental.

Adapun menurut Lovelock dalam buku Hardiansyah yang berjudul Kualitas Pelayan Publik mengatakan bahwa Kinerja Pelayanan yang berkualitas dapat diukur dari lima dimensi yaitu wujud (tangibe), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiviness), jaminan (assurance) dan empati (empathy). Teori kedua penulis menggunakan teori dari A. Dwiyanto yakni mengenai penilaian kinerja yang meliputi Produktivitas kerja, kualitas layanan, akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas.

2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa teori, pendapat ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini, yakni: Kinerja, indikator dan penilaian kinerja, Perbandingan, aparatur desa, dan aparatur kelurahan.

a. Kinerja

Kinerja berasal dari kata Job performance yakni prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Pada dasarnya kinerja memiliki banyak arti berdasarkan sudut pandang pendapat para ahli. Menurut Sulistiyani dan Rosidah mengemukakan bahwa “Kinerja merupakan catatan outcome (hasil) yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan.¹⁴ sedangkan menurut Prawirosentono mengatakan bahwa kinerja itu hasil kerja “thing done” yang dapat dicapai oleh seseorang ataupun kelompok dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diemban masing-masing individu dalam mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma dan etika.¹⁵ Sedangkan Sudarto mengungkapkan kinerja sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu organisasi yang dilakukan oleh individu yang dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat di ukur.

¹⁴ Ambar Teguh Sulistiyani dan Risodah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.224

¹⁵ Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo, *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Malang: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, hlm. 92

Sehingga dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam penentuan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam perusahaan.¹⁶

Pengertian kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Supriyatna bahwa Prestasi kerja, pelaksanaan kerja, mencapai kerja atau hasil kerja atau penampilan kerja.

b. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kualitas sumber daya manusia menurut Ruky adalah tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaanya untuk peningkatan produktivitas kerja dilingkingan organisai. Manusia merupakan salah satu unsur terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.

Menurut Sumardjan dalam Sedarmayani mengatakan bahwa manusia seutuhnya yang berkualitas adalah manusia seutuhnya yang berkualitas yang memiliki ciri-ciri:

1. mempunyai kepercayaan atas dirinya sendiri, tidak boleh rendah diri yang akan menimbulkan sikap pasrah atau menyerah pada nasib, sehingga ia

¹⁶ Reski Wahdani, *Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gow*, (Makasar: Universitas Muhammdiyah Makassar), hlm. 7

menjadi pasif atau apatis terhadap kemungkinan untuk memperbaiki nasibnya.

2. Mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasibnya
 3. Memanfaatkan setiap kesempatan yang menguntungkan
 4. Mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapi
 5. Selalu siap menghadapi perubahan social budaya yang terjadi dalam masyarakat.
 6. Bersedia dan mampu bekerja sama dengan pihak lain atas dasar pengertian dan penghormatan hak serta kepegaawaian masing-masing pihak.
 7. Mempunyai watak yang bermoral tinggi serta jujur dan dapat di percaya,
- Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kualitas sumber daya aparatur adalah tingkat pendidikan dan pelatihan, pengalaman, kinerja yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawab anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja disini yakni menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian serta perumbuhan seorang pegawai/karyawan. Menurut Gibson terdapat tiga factor yang berpengaruh terhadap kinerja, yakni:

1. Faktor individu yang meliputi kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat social, dan demografi seseorang.
2. Faktor psikologis yang meliputi persepsi, peran, sikap, kepriadian, motivasi, dan kepuasan kerja.



3. Faktor organisasi yang meliputi struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan(reward system).

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.¹⁷ Kinerja seorang pegawai akan baik apabila: Mempunyai keahlian yang tinggi, Kesiapan untuk bekerja, Lingkungan kerja yang mendukung, dan Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan akan masa depan.

Adapun menurut Usman faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

1. Kualitas pekerjaan, meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan keluhan.
2. Kuantitas pekerjaan yang meliputi volume keluhan dan kontribusi.
3. Supervise yang meliputi regulasi, dapat dipercaya dan diandalkan serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Konversi, meliputi pencegahan pemborosan, kerusakan dan pemeliharaan peralatan.
- d. Indikator penilaian kinerja

Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga dapat dikatakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat

¹⁷ Bintoro dan Daryanto, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media), hlm. 2

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Mangkunegara, ada beberapa indikator kinerja, yakni:

1. Kualitas kerja yakni seberapa baik seorang aparatur mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
2. Kuantitas kerja dimana maksudnya seberapa lama seorang aparatur bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja seseorang itu masing-masing.
3. Pelaksanaan tugas, seberapa jauh aparatur mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.
4. Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban aparatur untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

Keempat indikator ini penting untuk dijadikan acuan dalam penilaian kinerja aparatur desa, agar dapat melaksanakan tugas-tugas baik yang berhubungan dengan masyarakat maupun bukan. Tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk landasan atau informasi dalam pengambilan sebuah keputusan untuk mutasi, kenaikan jabatan dan kompensasi. Kemudian, sebagai alat untuk umpan balik mendorong kearah kemajuan disamping itu, tujuan penilaian kinerja sebagai sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan pengembangan bagi instansi yang bersangkutan

Penilaian kinerja aparatur desa disini sangat penting, karena aparatur desa yang mempunyai kinerja yang baik, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran akan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan desa

untuk meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat sebagai komitmen tanggung jawab mereka.

e. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Pemusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹⁹

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁰ Adapun kewenangan dari pemerintahan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas pembantuan dari pemerintah

¹⁸ Widjaja, 2003. *Otonomi Daerah*, Jakarta: PT raja Graindo Persada, hlm.3

¹⁹ Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang desa

²⁰ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 tentang desa

provinsi dan pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum kewenangan desa, penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan dan pemilihan serta penetapan kepala desa, pencalonan, pemilihan dan pengangkatan serta penetapan perangkat desa, pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Pencalonan pemilihan dan penetapan anggota badan perwakilan desa, penyusunan dan pelestarian lembaga adat, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa, pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah khas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan, dana atas bagi hasil, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten maupun kota.

f. Aparatur Desa

Dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pimpinan tentunya mempunyai suatu rencana program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu atau enam tahun kedepan selama memegang Jabatan sebagai Kepala Desa, dalam penyelegaraan rencana pimpinan desa tentunya tidak akan mampu mengemban tugas sendiri tanpa sinergi dari masyarakat dan dinas/instansi.

Aparatur desa merupakan faktor yang paling menentukan suatu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas tanggung jawab kepadanya. Dimensi dalam peningkatan kompetensi perangkat desa yakni mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta wawasan yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Aparatur desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Menurut Asroni mengatakan bahwa terdapat tingkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perangkat desa yaitu pertama, kemampuan dasar yang meliputi pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, serta pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kedua, kemampuan manajemen yang meliputi manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen aset, serta manajemen keuangan. Yang ketiga, kemampuan teknis. Dalam penyusunan administrasi desa, perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, perdes serta pelayanan publik.²¹

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas di bidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Namun, demikian yang terjadi di tingkat pemerintahan desa yaitu desa atau kelurahan justru banyak terjadi kejadian- kejadian yang menyangkut rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya. Terbukti kondisi desa dari dulu

²¹ Syaikhul Falah, Klara Wonar, dan Pangayow, 2018, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No. 2, hlm. 67



hingga sekarang tidak terdapat perubahan yang cukup signifikan. Berbagai kendala dialami oleh desa dalam melakukan Administrasi Desa, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa.

Awalnya, Desa kota kandis dendang dinamakan Marga Dendang yang dipimpin oleh Datuk Penghulu. Setelah itu wilayah tersebut terjadi perubahan bentuk pemerintahan dari marga menjadi pemangkuan yang dipimpin oleh seorang mangku. Setelah diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, maka pada tahun 1980 sebutan kampung berubah menjadi desa yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan kepala desa.

Tata kerja dan struktur organisasi Pemerintahan Desa Kota Kandis Dendang menganut sistem kelembagaan Pemeritahan Desa. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan penataan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Pasal 8 ayat 1 bahwa:²²

“Desa Kota Kandis Dendang yang semula 5 dusun, dikurangi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Rantau Sembilan, Dusun Sungai Besi, dan Dusun Karya Harapan”. Saat ini SDM Aparatur Desa Kota Kandis Dendang sebanyak 31 orang termasuk anggota BPD Desa Kandis Dendang.²³ Untuk saat ini Kepala Desa Kota Kandis Dendang di pimpin oleh bapak Imam Barokah periode 2016-2022.

Sedangkan untuk desa jati mulyo pada tahun 1980an merupakan pemukiman transmigrasi yang diketuai oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi

²² Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006, Pasal 8 ayat1.

²³ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa Peduli Gambut, Desa Kota Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, hlm. 57

(KUPT) dan dibantu oleh seorang Pjs Kepala Desa. Pada saat itu jati Mulyo merupakan bagian dari kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selang 5 tahun kemudian, pemerintahan pemukiman transmigran tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dan terdiri dari 2 dusun dan 15 RT.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah, Desa Jati Mulyo menggunakan sistem pola minimal, seperti di katakan sekretaris desa Jati Mulyo:²⁴

“Hal tersebut diungkapkan oleh bapak haryanto selaku sekretaris di Desa Jati Mulyo yang mengatakan bahwa di kantor Desa Jati Mulyo ini menggunakan sistem pola minimal, yang artinya dalam pola tersebut terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kepala Urusan, 2 orang Kepala Seksi, 1 orang staf keuangan, dan 2 orang kepala dusun, selain itu terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”²⁵

Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005 pada pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

²⁴ Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2012 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

²⁵ Wawancara dengan bapak Haryanto selaku Sekretaris Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2022

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kota Kandis

1. Sejarah Singkat²⁶

Awal terbentuknya Desa Kota Kandis Dendang ditandai dengan adanya pendatang yang datang dan membentuk pemukiman pada tahun 1970-an yang sebagian besar berasal dari suku melayu, bugis dan jawa. Nama Kota Kandis Dendang diambil dari nama sebuah kerajaan melayu diseberang sungai yang ada katanya Koto Gading menjadi Kota Kandis. Adapun kata Dendang mengikuti Marga Dendang.

Secara administratif Desa Kota Kandis Dendang merupakan salah satu desa dari 6 (enam) desa dan 1 (satu) kelurahan pada wilayah Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketika Desa ini terbentuk, sarana transportasi yang dapat dipakai saat itu hanya perahumelalui jalur sungai. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan Desa ini:

Tabel 2. Sejarah Perkembangan Desa²⁷

Tahun	Peristiwa
1970- 1976	Pendatang pertama kali datang pada tahun 1970-an yang berasal dari Muara Sabak, Maksud hadirnya pendatang pemukim pertama kali ke desa ini adalah sebagai petani yang memerlukan lokasi tempat bercocok tanam padi,

²⁶ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 52

²⁷ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 48

	untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga akan beras, yang kemudian mereka mulai mengolah lahan untuk tanaman pangan padi.
1985	hadir pendatang dari Pulau Kijang, Nipah Panjang dan lain-lain dengan jumlah cukup banyak, yang terdiri dari Suku Jawa, Kerinci, Minang, serta dari Medan. Pendatang tersebut bermukim di tepian Sungai Batang Hari pada bagian sebelah selatan atau sebelah kiri arus sungai mengalir
1990	jalur transportasi darat baru dibuka dan belum layak untuk dilalui karena masih berupa jalan tanah liat.
2000-an	Pembangunan perlahan mulai di lakukan, seperti sudah bisa dilewati oleh roda empat.

2. Keadaan Geografis Desa Kota Kandis Dendang

Berdasarkan data monografi desa, luas wilayah desa Koto Kandis Dendang ini adalah 196,00 Km² (19.600 hektar)¹ atau 41,09 % dari luas kecamatan Dendang, (luas wilayah Kecamatan Dendang adalah 477,17 Km²), yang terbagi oleh 8 (delapan) RT, 4 (empat) Parit, dan 3 (tiga) Dusun, yaitu Dusun Rantau Sembilan, Dusun Sungai Besi, dan Dusun Karya Harapan. Dengan batas wilayah disebelah utara berbatas dengan Sungai Batang Hari, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Muaro Jambi, sebelah timur berbatas dengan Desa Rawasari, sebelah barat berbatas dengan Kelurahan Rantau Indah, Desa Jati Mulyo dan Sungai Keman.

3. Kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jumlah penduduk di Desa Kota Kandis Dendang pada tahun 2019 adalah 1.085 jiwa, yang terdiri dari 556 laki-laki dan 534 perempuan, dengan rata-rata jumlah keluarga 254 KK, laju tingkat pertumbuhan penduduk di Desa Kota Kandis Dendang sebesar 2,3%, laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. dengan luas wilayah 196,00 Km² atau 41,09% dari luas Kecamatan Dendang. Berikut data jumlah dan komposisi penduduk menurut catatan kependudukan 2019.

Tabel 3. Data Jumlah dan Komposisi penduduk Desa Kota Kandis Dendang²⁸

Jumlah Penduduk Desa				
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
2019	556 jiwa	534 jiwa	1.085 jiwa	254 KK

4. Visi dan Misi Desa Kota Kandis Dendang

Visi pembangunan Desa Kota Kandis Dendang tahun 2016-2022 yakni “terwujudnya sebuah desa yang maju, aman, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya luhur, dan berakhlak mulia, serta penuh barokah. Visi tersebut ditetapkan berdasarkan potensi, kondisi, serta tantangan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki desa Kota Kandis Dendang. Dengan begitu jika pemerintah desa dan masyarakat sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.”²⁹

5. Struktur Pemerintahan

²⁸ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 55

²⁹ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 55

Dari hasil FGD tentang kepemimpinan tradisional desa, didapati informasi bahwa Desa Kota Kandis Dendang tidak mempunyai kepemimpinan tradisional. Hal ini dikarenakan desa ini terbentuk oleh para pendatang sekitar tahun 1970-an yang datang dan bermukim secara bersamaan, sehingga masyarakat Desa Kota Kandis Dendang masih menganggap bahwa pemimpin formal adalah kepala desa, kepala dusun atau Kadus.

Berdasarkan dokumen RPJMDes, bahwa Desa Kota Kandis Dendang mempunyai arah kebijakan pembangunan desa dari Priode tahun 2017-2018 diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan SDM, perbaikan dan pembangunan sarana prasarana desa, pada Periode tahun 2018-2019 diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta perbaikan mutu layanan publik, periode tahun 2019-2020 untuk penyelesaian kegiatan pembangunan desa diberbagai bidang, dan pada Periode tahun 2020-2022 diarahkan pada penyelesaian/penyempurnaan kegiatan pembangunan desa diberbagai bidang demi mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan.³⁰ Berikut tabel perkembangan kepemimpinan Desa Kota Kandis Dendang.

Tabel 4. perkembangan kepemimpinan Desa Kota Kandis Dendang³¹

No	Nama	Periode	Sebutan
1	Suhaimi	1975-1978	PJS Datuk Pesira Status Wilayah masi berbentuk marga
2	Raja Ahmad Kelana	1978-1994	Datuk Kepala Desa
3	Tombong Sapara	1994-2002	Kepala Desa

³⁰ RPJMDes Kota Kandis Dendang 2017, hal. 43

³¹ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 56

5	Alfian	2003-2008	Kepala Desa
6	Kamarudin	2008-2009	PJS Kepala Desa
7	Zarkismi	2009-2015	Kepala Desa
8	Dsnang Lambang, S.Sos	2015-2016	PJS Kepala Desa
9	Imam Barokah	2016-2022	Kepala Desa

6. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Kepemimpinan Desa Kota Kandis Dendang³²



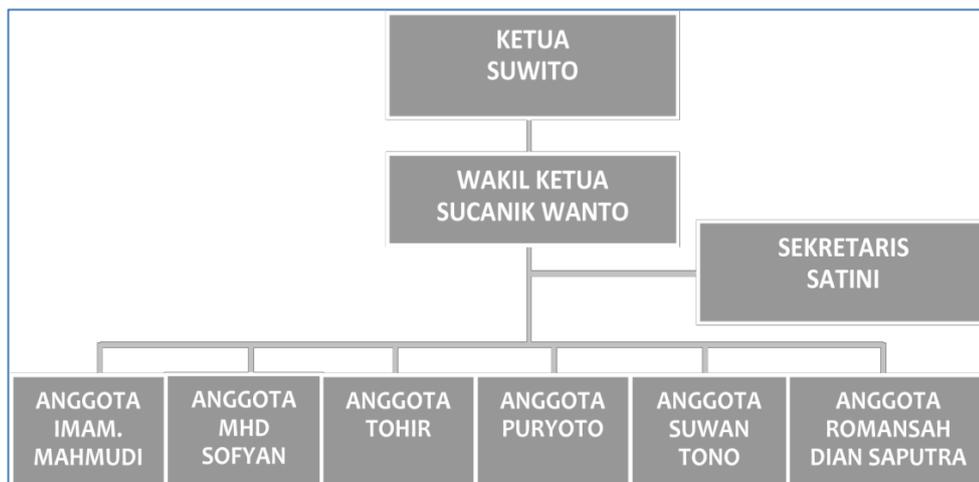
Gambar 2 Struktur BPD Desa Kota Kandis Dendang³³

³²Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 57

³³ Ida Mawani, Parida Wati, Ramat Edi, dkk, Profil Desa..., hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



B. Sejarah Desa Jati Mulyo

1. Sejarah Singkat³⁴

Nama Desa Jati Mulyo diambil dari hasil musyawarah para sesepuh pada waktu itu. Kata Jati Mulyo berasal dari kata Jawa Timur, karena dulunya 99% penduduk Jati Mulyo merupakan transmigran yang berasal dari Jawa Timur. Kata Mulyo berasal dari harapan penduduk yang ingin hidup sejahtera setelah transmigrasi.

Sebelum resmi menjadi Desa Jati Mulyo, pada tahun 1980-an, Jati Mulyo merupakan pemukiman transmigrasi yang diketuai oleh seorang Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) dan dibantu oleh seorang Pjs. Kepala Desa, dan pada saat itu Jati Mulyo termasuk bagian dari Muara Sabak, Tanjung Jabung Barat. Selang 5 tahun pemerintahan pemukiman transmigran diserahkan kepada pemerintah daerah, dan terbentuk lah Jati Mulyo yang terdiri dari 2 dusun dan 15 RT. Pada tahun 2001, terjadi pemekaran kabupaten yang membagi wilayah

³⁴ Sulaiman, Haerudin Inas, dan Wiliam Christian, *Profil Desa Peduli Gambut Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, hal. 12

Tanjung Jabung Barat dengan nama Tanjung Jabung Timur, dan Desa Jati Mulyo termasuk wilayah didalamnya, sampai saat ini tercatat 8 orang pemimpin Desa Jati Mulyo, seperti yang tertulis pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Sejarah Pemerintahan dan Kepemimpinan Desa Jati Mulyo³⁵

No	Nama	Tahun Menjabat	Jabatan
1	Hartoyo	1980-1987	KUPT
2	Wiryo Utomo	1987-1990	PJS
3	Sastro Sumarto	1990-1998	Kepala Desa
4	Sugito	1998-1999	PJS
5	Hariyana	1999-2007	Kepala Desa
6	Hariyana	2007-2009	PJS
7	Gatot Edi Susilo	2009-2015	Kepala Desa
8	M. Yunus	2015-2016	PJS
9	Suyoto	2017-sekarang	Kepala Desa

2. Keadaan Geografis Desa Jati Mulyo

Secara geografis Desa Jati Mulyo di lintasi oleh 3 sungai yakni sungai Badae, Sungai Cengel, dan Sungai Kemang. Dengan luas wilayah 9764,66 Ha, terbagi menjadi 2 Dusun seperti yang dikatakan bapak haryanto bahwa:

“Desa Jati Mulyo ini Dusun ada dua Dusun yakni Jati Moro yang memiliki 6 (enam) RT dan Dusun Sari Mulyo yang memiliki 9(sembilan) RT. Desa Jati

³⁵ Sulaiman, Haerudin Inas, dan Wiliam Christian, *Profil Desa...*, hal. 36

Mulyo bertetangga dengan 3 desa, yaitu Desa Sido Mukti, Kelurahan Rantau Indah, Desa Catur Rahayu”³⁶.

Tabel 6. Info Geografis Desa Jati Mulyo³⁷

Informasi	Keterangan
Lintang	1°16'10.58"S
Bujur	103°59'2.47"E
Batas Utara	Desa Sido Mukti
Batas Timur	Kelurahan Rantau Indah
Batas Selatan	Desa Catur Rahayu
Batas Barat	Desa Catur Rahayu dan Sido Mukti, kawasan hutan produksi (HTR), sungai keman, dan Hutan Lindung Gambut (HLG)
Jarak dari Kecamatan	2,5 Km
Jarak dari Kabupaten	15 Km
Jarak dari Provinsi	100 Km

Untuk saat ini pembangunan yang menjadi prioritas Desa Jati Mulyo adalah jalan umum desa, jembatan, usaha perkebunan masyarakat dan sarana umum lainnya seperti sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. Kependudukan Desa Jati Mulyo

Jumlah penduduk Desa Jati Mulyo berdasarkan pendataan terakhir 2020 adalah sebanyak 711 Jiwa, yang terdiri dari 352 laki-laki dan 359 perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan selisish

³⁶ Wawancara dengan Bapak Haryanto Selaku Sekretaris Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2020

³⁷ Sulaiman, Haerudin Inas, dan Wiliam Christian, *Profil Desa...*, hal. 40

sebanyak 7 Jiwa. Dari total 711 Jiwa, total kepala keluarga yang ada di Jati Mulyo adalah 230 KK.

Tabel 7. Klasifikasi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan KK³⁸

Keterangan	Jumlah
Jumlah Laki-laki	352 orang
Jumlah Perempuan	359 orang
Jumlah Total	711 orang
Jumlah Kepala Keluarga	230 KK
Kepadatan penduduk	11,34 jiwa/Km ²

4. Visi dan Misi Desa Jati Mulyo

Visi dari desa Jati Mulyo yakni terwujudnya Desa Jati Mulyo yang aman, cerdas, berdaya saing, berbudaya dan berakhlak mulia. Misi dari desa Jati Mulyo ini yakni mewujudkan keamanan dan tertibnya lingkungan jati mulyo, meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah, mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintah desa yang baik. Kemudian misi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.

5. Struktur Pemerintahan

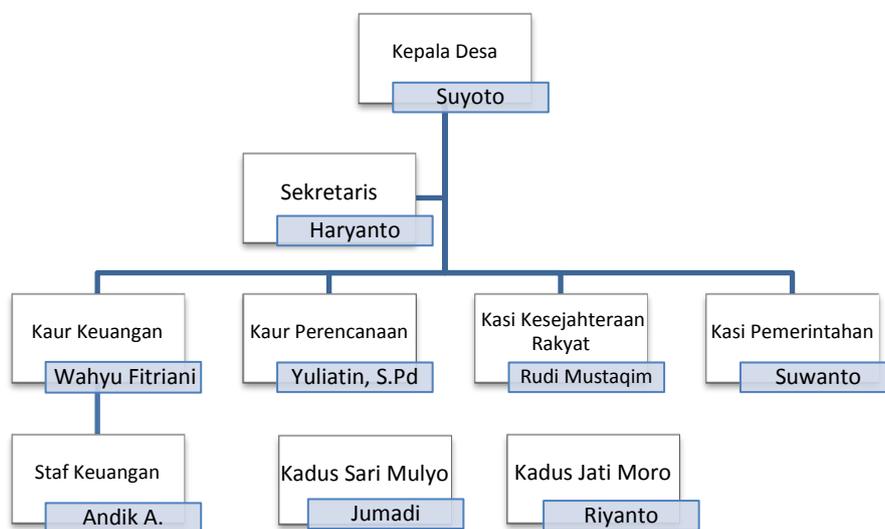
Struktur Organisasi disini berarti kerjasama atau pembagian tugas antara personil pemerintah serta masyarakat untuk melakukan pembangunan. Sebagai organisasi kerja, maka untuk mencapai organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing, baik itu untuk tujuan

³⁸ Sulaiman, Haerudin Inas, dan Wiliam Christian, *Profil Desa...*, hal. 32

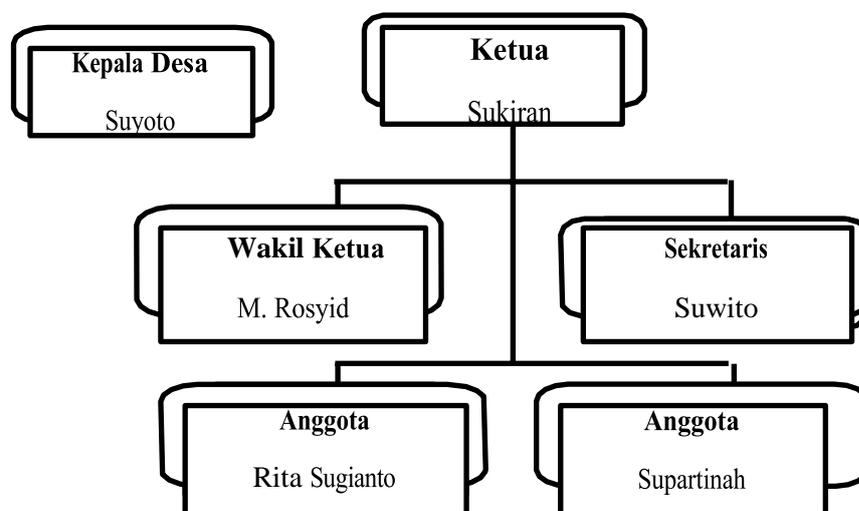
umum maupun tujuan khusus, sehingga dapat tersusun dengan rapi tingkatan dari yang tertinggi atau pemimpin sampai bawahnya, seperti dari kepala desa sampai kepala dusun.

Adapun struktur dari organisasi pemerintahan desa Jati Mulyo adalah sebagai berikut.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Jati Mulyo³⁹



Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Jati Mulyo



³⁹ Sulaiman, Haerudin Inas, dan Wiliam Christian, *Profil Desa...*, hal. 38

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sistem Kerja Aparatur Desa

Sistem kerja merupakan suatu rangkaian tata kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, yakni:

1. Susunan Organisasi
 - a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
 - b. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
 - c. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.
 - d. Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
 - e. Sekretariat desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
 - f. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan atau Kaur.
 - g. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

- h. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas.
- i. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- j. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
- k. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- l. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yakni, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yakni seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- m. Masing-masing dari seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Kinerja aparat desa harus sesuai dengan pedoman yaitu konstitusi atau undang-undang yang telah dibuat untuk mengelola dan menangani urusan desa. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2012⁴⁰ tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah, Desa Jati Mulyo menggunakan sistem pola minimal, yakni terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 2 orang Kepala Urusan, 2 orang Kepala Seksi, 1 orang staf keuangan, dan 2 orang kepala dusun. Oleh karena itu organisasi yang ingin mencapai tujuan dan hasil yang memuaskan harus mampu melalui prosedur dan sistem kerja yang dibuat tepat dan sesuai dengan standar.

“Hal tersebut dijelaskan oleh pak haryanto yang merupakan sekretaris Desa Jati Mulyo yang mengatakan bahwa untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) aparatur desa disini seperti halnya pada umumnya yakni masuk jam operasional mulai pukul 07.00-15.30 (senin-kamis), dan pukul 07.00-10.30 (Jum’at), dan pakaian pun sesuai yang ditentukan tidak diperbolehkan memakai baju bebas, sehingga untuk aturan baju sudah ada aturan yang tidak boleh dilanggar, apabila melanggar maka akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka”.⁴¹

Tata kerja dan struktur organisasi Pemerintahan Desa Kota Kandis Dendang menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan penataan desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Pasal 8 ayat 1 bahwa “Desa Kota Kandis Dendang yang semula 5 dusun, dikurangi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Rantau Sembilan, Dusun Sungai Besi, dan Dusun Karya Harapan”⁴². Untuk saat ini SDM Aparatur Desa Kota Kandis Dendang sebanyak 31 orang termasuk BPD didalamnya. Senada dengan yang disampaikan informan lain.

⁴⁰ Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

⁴¹ Wawancara dengan bapak Haryanto Sekretaris Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2022

⁴² Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006

“hal tersebut diungkapkan oleh bapak Husaini, S.Pd yang merupakan sekretaris kantor desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa di Kantor Desa Jati Mulyo ini sistem prosedur kerjanya sama halnya dengan sistem prosedur kerja pada umumnya, menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditetapkan waktunya yakni paling lambat selama 3 hari, kemudian apabila ada hal yang diluar kendali atau tidak di duga maka para aparatur boleh untuk meminta izin terlebih dahulu kepada atasan, kami melayani masyarakat dengan sepenuh hati selama masyarakat itu membutuhkan pelayanan maka kami siap untuk melayani”.⁴³

Namun, saat observasi peneliti menemukan kejanggalan dimana aparatur desa Kota Kandis Dendang masih belum disiplin dengan hal tersebut, jam masuk operasional kerja. Hal ini didukung oleh salah satu wawancara dengan masyarakat desa Kota Kandis Dendang.

“Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Sri yang merupakan salah satu masyarakat Desa Kota Kandis Dendang, beliau mengatakan bahwa Biasanya jam 07.30 an belum juga buka kantor desa, karna jarang sekali para pegawai kantor datang pagi, biasanya masyarakat yang datang untuk mengurus atau ada keperluan datang sekitar jam 10.00 dikarenakan pegawai kantor desa datang jam 09.00 sampai jam 15.00 sudah pulang”.⁴⁴

Berdasarkan analisa dan observasi peneliti dari wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pentingnya sikap disiplin serta pendekatan sosial antara aparatur desa maupun, aparatur desa dengan kepala desa.

B. Pelayanan Aparatur Desa Kota Kandis Dendang dan Jatimulyo

Aparatur sebagai unsur utama sumber daya manusia yang memiliki peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pola militer yang terpadu, sesuai dengan tantangan yang sudah ada dan mendunia, perwujudan pola pemerintahan yang baik diperlukan aparatur yang berkompeten dalam penyelenggaraan Negara dan juga pembangunan. Melihat pentingnya peran dari

⁴³ Wawancara dengan bapak Husaini Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang, 6 Maret 2022

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Sri masyarakat Desa Kota Kandis Dendang, 04 Maret 2022

aparatur ini dalam organisasi, tidak berlebihan jika bisa dikatakan seorang aparatur adalah sumber daya yang penting dan mempunyai dampak langsung pada instansi tersebut.

Pemerintah Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang terdiri dari kepala urusan pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan yang terdiri dari Kepala Dusun. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Aparat Desa di kantor Desa Kota Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup respon terhadap tuntutan kerja yang selama ini dibebankan kepada semua aparat desa tersebut. Sama halnya Aparat Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat baik respon terhadap tuntutan kerja yang selama ini dibebankan kepada aparat desa. Untuk lebih dipahami dapat diuraikan hasil penelitian yang dilakukan sesuai teori A. Dwiyanto, sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan efisiensi dan efektifitas pelayanan aparatur desa di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap masyarakat Desa. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud diperlukan aparatur desa yang profesional dalam bidangnya.

“Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Husaini, S.Pd yang merupakan sekretaris kantor desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa selama saya menjadi sekretaris desa, sudah paham apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris, walaupun ada beberapa yang belum dipahami bisa bertanya

langsung kecamatan atau pendamping desa. Suatu organisasi pemerintah daerah menuntut adanya aparatur atau perangkat daerah yang memiliki kemampuan dalam hubungan dengan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.”⁴⁵

Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dalam memberikan pelayanan public juga harus diperkuat dengan mekanisme kerja yang adil dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sumiati selaku masyarakat desa Kota Kandis Dendang bahwa:

“Hal ini diungkapkan juga oleh ibu Sumiati sebagai salah satu masyarakat desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa Dalam pelayanan di Desa Kota Kandis Dendang sudah cukup baik, namun ada hal yang terkadang memperlambat dalam pelayanan, seperti sulitnya menemui kepala desa untuk tanda tangan, kurang tanggapnya respon dari kepala desa”.⁴⁶

Produktivitas dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan, sebagai alat untuk mengukur sejauh manakah kinerja dari aparatur desa di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bapak Suwijo selaku masyarakat di Desa Jati Mulyo bahwa:

“Hal ini diungkapkan oleh bapak Suwijo selaku masyarakat desa Jati Mulyo mengatakan bahwa aparatur desa dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di kantor desa Jati Mulyo agar pelayanan ini dapat terus berjalan dengan baik terhadap masyarakat.⁴⁷ Kemudian hal tersebut diperkuat dengan ungkapan oleh bapak Haryanto sebagai Sekretaris Desa Jati Mulyo mengatakan bahwa semua aparatur desa Jati Mulyo sudah paham akan tugas dan posisinya, karena mereka bekerja sesuai dengan keahlian mereka dibidangnya masing-masing.”⁴⁸

Dari beberapa pernyataan dari kedua belah pihak aparatur desa di atas bahwa pemahaman dan keterampilan kinerja aparat desa sudah cukup, namun untuk Desa

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Husaini S.Pd Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang, 6 Maret 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Sumiati Masyarakat Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Suwijo Masyarakat Desa Jati Mulyo, 8 Maret 2022

⁴⁸ Wawancara dengan bapak haryanto Sekretaris Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2022

Kota Kandis Dendang masih perlu di benahi disebabkan oleh kurangnya peran dari kepala desa Kota Kandis Dendang dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi desa.

Karena di bagian produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan suatu kinerja aparatur desa. Peneliti juga telah melakukan observasi pada 4 Maret 2022, dalam pengamatan peneliti, proses pelayanan ditutup atau kantor desa tutup dikarenakan tidak ada satupun pegawai desa yang masuk melainkan melakukan kegiatan masing-masing, kemudian kepala desa yang jarang bahkan tidak menentu datang ke Kantor desa, tidak ada jam kerja dan tidak ada papan informasi., kemudian hubungan antara aparatur desa dan kepala desa kurang dekat, bahkan ketika penulis menanyakan keberadaan kepala desa, beliau tidak mengetahui pasti dimana keberadaan kepala desa saat jam kerja berlangsung. Lebih lanjut peneliti bertanya mengenai pendapat kepala dusun Desa Kota Kandis mengatakan bahwa:

“Hal ini diungkapkan oleh bspak Slamet selaku Kepala Dusun di Desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa dalam hal kritik dan saran atau sesuatu yang sangat dibutuhkan kami sebagai Kepala Dusun memiliki tugas sebagai penyalur keinginan dari masyarakat sehingga komunikasi sangat penting antara masyarakat dan pemerintah desa. Apa yang dibutuhkan masyarakat didusun ini kami akan sampaikan di rapat yang akan diadakan seperti R untuk ditanggapi aparatur desa.”⁴⁹

Untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan, koordinasi antar pemberi layanan sangatlah dibutuhkan agar terjalin pula tali silaturahmi dan kekompakan

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Slamet Kepala Dusun Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022



antar perangkat desa menjadi tujuan utama dalam menjalankan tugas berjalan dengan baik.

Kemudian peneliti juga melakukan observasi pada tanggal 8 Maret 2022 di Kantor Desa Jati Mulyo melihat bahwa, hubungan antar aparat terjalin dengan baik, bahkan sekretaris mengatakan bahwa siap melayani 24 jam sekalipun dirumah, kemudian disiplin jam operasional kerja. Disini setelah peneliti analisa dan obseravi produktivitas salah satu ukuran keberhasilan suatu kinerja individu maupun tim atau organisasi. Apabila produktivitasnya tinggi atau bertambah, maka dinyatakan berhasil dan sebaliknya apabila rendah dari standar atau menurun dikatakan bahwa kurang sukses. Dapat dilihat bahwa desa kota kandis dendang masih kurang sukses dalam produktivitas.

Mengenai hubungan pemimpin dengan pegawai itu sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas kinerja aparatur desa dengan faktor individu, faktor tim atau organisasi dan faktor kepemimpinan itu, dengan adanya faktor kepemimpinan maka terdapat dorongan, masukan serta bimbingan kepada pegawai dalam bekerja. Hubungan antara aparat dan kepala desa Jati Mulyo sudah cukup baik, hal ini terlihat dari kepala desa yang selalu memberikan instruksi dan perintah dengan jelas agar pekerjaan terkoordinasi dengan baik, kemudian jalinan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan pun sudah cukup optimal. Hal ini terlihat saat peneliti melakukan observasi di kantor desa Jati Mulyo dimana kepala desa yang selalu bercengkrama dengan aparat yang lainnya dan pergi bersama untuk kondangan acara di salah satu aparatur desa.

Hubungan antara kepala desa dengan aparat desa Kota Kandis Dendang dikatakan masih kurang baik terlihat saat peneliti melaksanakan KKN di Desa tersebut sekaligus observasi bahwa kepala desa lebih cuek dan tidak begitu akrab dengan para aparat desa, kemudian jarang terlihat di Kantor Desa, dan kurang tegasnya Kepala desa kepada para aparatur yang kurang disiplin kerja, kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan para bawahan masih perlu diperbaiki.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik. Secara garis besar ada 4 pokok yakni kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan keramahan. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan pelayanan yang terintegrasi, maksudnya pelayanan atau jasa menjadi tidak unggul bila ada komponen yang kurang. Masyarakat berpandangan baik terhadap pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, dapat dijelaskan dalam hal ini bahwa berkualitas tidaknya suatu pelayanan yang diberikan akan berpengaruh pada kinerja dari aparatur desa di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo.

Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas layanan yang dimiliki oleh aparatur desa di kedua Desa tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengukur kinerja aparatur desa, untuk mengetahui seperti apa kualitas layanan aparatur desa maka peneliti tentunya mewawancarai informan terkait masalah kualitas pelayanan aparatur desa di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo.



“Hal ini diungkapkan oleh bapak Suyoto yang selaku Kepala Desa di Desa Jati Muyo mengatakan bahwa dalam hal pelayanan kepada masyarakat para aparatur desa dengan waktu penyelesaiannya diusahakan segera mungkin selesai, tergantung banyak tidaknya masyarakat yang mengajukan surat atau keperluan lainnya dan apakah masyarakat itu sudah memenuhi persyaratan seperti prosedur, apabila belum memenuhi maka masyarakat harus memenuhi syarat tersebut.⁵⁰ Kemudian hal tersebut diungkapkan juga oleh bapak Suwijo masyarakat desa Jati Mulyo yang mengatakan bahwa baik dan tidaknya kinerja dari aparatur desa bergantung pada kualitas layanan yang dimiliki aparat desa, untuk kualitas layanan di desa Jati Mulyo ini sudah cukup baik, karna setiap waktu aparat desa siap dan sigap dalam melayani masyarakat, dan saya sendiri sebagai salah satu masyarakat di Desa ini cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para aparatur desa”.⁵¹

Dari tanggapan diatas bahwa baik tidaknya suatu kinerja seseorang atau dalam suatu organisasi bergantung pula pada kualitas dari satu layanan. Begitupun tanggapan dari Desa Kota Kandis Dendang.

“Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Husaini, S.Pd selaku Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang yang mengatakan bahwa Aparatur desa Kota Kandis dalam segi kualitas layanan dalam penyelesaian cukup baik, namun terdapat hal yang mempengaruhi kurangnya kualitas pelayanan seperti sarana prasarana yang masih belum cukup. Namun dengan kekurangan tersebut aparatur tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat”.⁵²

Adapun tanggapan dari responden mengatakan bahwa aparatur desa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat. Dan peneliti disini sudah melihat kualitas layanannya yang cukup bagus.

“hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Sri sebagai Masyarakat Desa Kota Kandis Dendang yang mengatakan bahwa meski kualitas suatu pelayanan cukup bagus tetap perlu untuk ditingkatkan lagi agar kinerja aparatur desa Kota Kandis ini menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal sikap yang lebih ramah lagi kepada masyarakat, etika dalam pelayanan yang harus tetap dipatuhi. Kemudian, jam masuk operasional kerja yang tidak tepat waktu yang ditentukan, dimana masih sering masuk waktu siang dan tidak

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Suwijo masyarakat Desa Jati Mulyo, 8 Maret 2022

⁵¹ Wawancara dengan bapak Suyoto Kepala Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2022

⁵² Wawancara dengan bapak Husaini Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang, 6 Maret 2022

menentu, saat jam kerjapun sering dijumpai sebagian dari mereka pergi mengurus kepentingan masing-masing”.⁵³

Dapat dijelaskan di atas bahwa informan memberikan tanggapan yang baik terhadap kualitas pelayanan aparat desa Kota Kandis Dendang dan Jati Mulyo, namun untuk aparat desa Kota Kandis yang seharusnya datang tepat waktu yang seharusnya datang tepat waktu dalam menjalankan sesuai prosedur. Kemudian kualitas pelayanan ini adalah hal sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi khususnya aparat desa Kota Kandis Dendang dan Jati Mulyo yang merupakan salah satu fokus dari penelitian ini.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan sebelumnya menggambarkan kinerja dari aparat desa Kota Kandis Dendang cukup baik, dan aparat desa Jati Mulyo baik, hal ini dapat dilihat pada penjelasan informan yang mengatakan dimana kantor Desa Kota Kandis Dendang kualitas pelayanan yang cukup berkualitas seperti tingkat pendidikan serta pengalaman aparturnya, dan informan mengatakan Kantor Desa Jati Mulyo kualitas pelayanan yang sangat baik seperti tingkat pendidikan serta sigapnya pelayanan aparatur siap kapan pun. Maka hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas kinerja dari aparat desa Kota Kandis Dendang cukup baik, dan aparat desa Jati Mulyo sangat baik dalam sistem pelayanan ini dapat berjalan lebih maksimal.

3. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, dan pengetahuan bar, birokrasi harus merespon secara cepat aspirasi dari masyarakat dan memberikan pelayanan

⁵³ Wawancara dengan ibu Sri masyarakat Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

dengan prosedur yang sederhana. Responsivitas sendiri sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru, dan tuntutan baru dari masyarakat.

Pentingnyamewujudkan apa yang telah direspon tersebut kedalam program dan kegiatan pelayanan adalah merupakan bentuk dari kewajiban birokrasi dan pengabaian terhadap hal yang akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat yang pada gilirannya mungkin berakibat kepada timbulnya krisis kepercayaan kepada pemerintah.

Responsivitas adalah kemampuan dar aparaturnya dalam mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan masyarakat Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa tersebut. Secara singkatnya responsivitas ini mempunyai arti memperjelas program dan kegiatan dari pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Disini responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, maksudnya semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik atau pemerintah maka responsivitas tersebut dinilai semakin baik. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana tingkat responsivitas aparaturnya kedua desa dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi, maka peneliti harus mewawancarai informan yang dianggap paham dengan tugas para aparaturnya masing-masing.



Kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan baik sesuai dengan apa yang menjadi tujuan visi misi dari kedua desa tersebut.

Sikap responsif aparatur kedua desa ini hampir sama yakni siap tanggap, dilihat dari hasil wawancara dengan kepala dusun mengatakan bahwa:

“Hal ini diungkapkan oleh bapak Slamet selaku masyarakat di Desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa Aparat desa ini selalu tanggap, mendengar apa saja yang dikeluhkan masyarakat. Maka dari itulah kita selalu mengadakan rapat sekali setahun dengan mengundang perwakilan masyarakat (RT) mengikuti rapat (Musrembang) untuk mengumpulkan berbagai kendala maupun keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang ada., rata-rata sudah berperan aktif dalam melakukan pelayanan, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, untuk disiplin kerja lebih kemasalah waktu kehadiran aparatur desa disini.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, pelaksanaan kerja atau responsivitas sudah baik dan berdasarkan standar kinerja atau tupoksi masing-masing pegawai, pelaksanaan tupoksinya juga dilakukan sebaik mungkin. Senada dengan tanggapan kepala dusun Kota Kandis Dendang, kepala dusun Jati Mulyo mengatakan bahwa:

“Hal tersebut diungkapkan juga oleh bapak Riyanto selaku Kepala Dusun Jati Mulyo yang mengatakan bahwa Kami tanggap akan keluhan dari masyarakat, sehingga kami melaksanakan musrembang rapat tahunan, setiap pertengahan tahun, disitulah keinginan dan keluhan masyarakat kami sampaikan.”⁵⁵

Melalui hasil observasi yang dilihat peneliti bahwa, sikap tanggap aparatur desa Jati Mulyo dalam merespon keinginan serta kebutuhan masyarakat sudah sangat baik. Namun, kendalanya, aparatur pemerintahan desa kota kandis dendang

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Slamet kepala dusun Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Riyanto kepala dusun Jati Mulyo, 8 Maret 2022

jam operasional masuk kerja tidak menentu dan memilih melakukan kegiatan lain. Sehingga orientasi pelayanan juga kurang baik, dengan demikian perlu menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah desa untuk mengantisipasi dan memperbaiki serta meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, sehingga esensi dari mewujudkan hubungan harmonis dan dinamis antara pemerintah desa dengan masyarakat maupun kepala desa dengan para aparturnya untuk mencapai tujuan bersama.

Responsivitas ini menggambarkan secara langsung kemampuan aparatur desa dalam mewujudkan kinerjanya untuk mengatasi, menanggapi serta memenuhi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Masyarakat akan merasa senang terhadap sikap petugas pelayanan yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersama-sama mencari jalan keluar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, sejauh ini responsivitas para aparatur desa terhadap kebutuhan masyarakat sudah cukup baik dilihat dari keselarasan antara program kegiatan dan kebutuhan aspirasi masyarakat, karena dalam peningkatan kinerja dilihat dari faktor eksternal dan internal yakni faktor eksternal merupakan input yakni aspek yang mempengaruhi kinerja organisasi yang terdiri atas pengawasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana dan budaya organisasi, kemudian faktor internal yang termasuk kedalam proses dari perencanaan, pengorganisasian, proses pelaksanaan, proses penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi dari kerja.

4. Responsibilitas

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Karna responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan itu sendiri. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian kinerja dari aparatur desa Di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo. Oleh sebab itu untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja aparatur desa. Maka peneliti mewawancarai informan yakni ibu sumiati selaku masyarakat bahwa:

“Hal ini diungkapkan oleh ibu Sumiati selaku masyarakat Desa Kota Kandis Dendang yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan administrasi di desa ini cukup baik, mungkin terdapat kendala dikarenakan tanda tangan dari kepala desa atau persetujuan dari kepala desa, sehingga cukup lama penyelesaiannya disini selebihnya sudah cukup baik, responsibilitas ini juga mengukur sejauh mana pemberian pelayanan publik yang dilakukan para aparatur sudah sesuai tau belum dan saya katakan sudah cukup tanggap, produktif, namun untuk ketepatan waktu dan disiplin kerja masih kurang”.⁵⁶

“Hal diatas juga diungkapkan oleh bapak Suwijo selaku masyarakat Desa Jati Mulyo yang mengatakan bahwa dalam kinerja pegawai masih menjadi perhatian tentunya, mengingat masih banyaknya kejadian tentang rendahnya kinerja pegawai kantor desa, namun pada Pelayanan di Desa Jati Mulyo ini sudah sangat baik karena berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program pemerintah desa dan kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh aparat desa”.⁵⁷

Dari data informan diatas, menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sudah berjalan dengan baik. Responsibilitas yang baik tentunya hal sangat penting untuk dilaksanakan. Sebab responsibilitas salah

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Sumiati masyarakat Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Suwijo masyarakat Desa Jati Mulyo, 8 Maret 2022.

satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja dari kedua aparatur desa sudah berjalan baik yang dimana aparat desa Kota Kandis Dendang cukup baik meskipun terdapat kendala namun tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai administrasi pemerintahan, begitupun Desa Jati Mulyo yang sudah berjalan baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik.

Oleh karena itu, tanggung jawab ini penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja aparatur desa di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo ini agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada publik, karena mengingat tanggung jawab ini sudah dilakukan sesuai prinsip administrasi baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, tanggung jawab bisa saja pas pada suatu ketika akan berbenturan dengan tanggung jawab. Dimensi dari tanggung jawab sendiri adalah daya tanggap, produktif, ketepatan waktu dan disiplin dalam bekerja..

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggung jawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik mengikuti pada para aparat desa yang dipilih rakyat, artinya Kepala Desa dipilih oleh rakyat. Hal ini sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung

jawaban secara periodik. Dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat dan akuntabilitas inipun merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai dan norma eksternal yang ada. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya sebab akuntabilitas ini juga termasuk kedalam tanggung jawab. Sehingga kinerja aparatur kedua desa ini menjadi baik dan tergantung pula pada akuntabilitas yang dimiliki oleh para aparat desa.

“Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Haryanto selaku sekretaris Desa Jati Mulyo mengatakan bahwa Aparat Desa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur patuh terhadap aturan yang sudah ada, kecuali terkendala hal yang tidak terduga, kemudian Kepala Desa yang sebagai panutan atau contoh untuk aparatur desa ini sudah cukup baik, sehingga untuk mencapai sebuah kinerja aparat desa yang baik harus ada dorongan akuntabilitas dari pimpinan yang baik.”⁵⁸

Adapun peneliti juga mewawancarai informan dari desa Kota Kandis Dendang yakni Pak Husaini mengatakan bahwa:

“Hal tersebut diungkapkan juga oleh bapak Husaini, S.Pd selaku Sekretaris Kantor Desa Kota Kandis Dendang yang mengatakan bahwa Untuk akuntabilitas aparat desa di Desa Kota Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini baik. Yang jadi persoalan itu masalah ketepatan waktu untuk kehadiran, dimana ada beberapa yang malas untuk datang ke kantor, dan ada juga yang terdapat sedikit keterlambatan dalam jam operasional kerja.”⁵⁹

Oleh karena itu Akuntabilitas ini menjadi salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja aparatur desa di Desa Kota Kandis Dendang maupun Desa Jati Mulyo. Pada dasarnya setiap dari manusia membutuhkan pelayanan bahkan pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa sebuah pelayanan tidak akan dapat

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Haryanto sekretaris Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Husaini sekretaris Desa Kota Kandis Dendang, 6 Maret 2022

dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat harus senantiasa selalu membutuhkan yang dinamakan pelayanan public yang baik dan berkualitas dari pemerintah, walaupun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan setiap harapan karena berdasarkan dengan pelayanan yang terjadi lumayan berbelit. Sehingga aparatur desa kota kandis belum mampu memberikan pelayanan atau kerja yang tepat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam mekanisme dan prosedur pelayanan kantor desa. Penilaian tersebut dapat dilihat melalui pernyataan informan dan pengamat peneliti dilapaangan mengenai akuntabilitas pelayanan administrasi desa yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah desa. Ketidaktepatan dalam melaksanakan suatu pelayanan ini menunjuk pada kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan yang ditempuh oleh pemerintah desa dipandang kurang konsisten dengan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal prosedur dan birokrasi pelayanan yang rumit dan bertele-tele.

Fungsi dari aparatur pemerintahan desa utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga aparatur desa memiliki tugas seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, menyelenggarakan administrasi yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk program pembangunan Desa di Desa Jati Mulyo berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Jati Mulyo (RKPDDes 2020) dan keberhasilan program pembangunan desa untuk program pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, pembangunan fisik disini seperti pembuatan atau perbaikan jembatan antar dusun/desa.

C. Kendala dalam Kinerja Aparatur Desa

Dalam pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pimpinan tentunya mempunyai rencana program dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun dalam kurun waktu 6 (tahun) selama memegang jabatan kepala desa. Sedangkan rencana dan program kerja bidang pemerintahan desa selama kurun waktu 1 tahun anggaran secara umum memenuhi program kerja sebagai berikut:

1. Membuat Produk Hukum Desa yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan salah satu acuan kerja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan rekapitulasi perkembangan laju pertumbuhan jumlah penduduk.
3. Melaksanakan catur tertib pertahanan.
4. Melaksanakan manajemen pemerintahan terhadap SDM rekrutmen perangkat desa dan Lembaga Pemerintahan Desa berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
5. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban wilayah dan lingkungan serta kewaspadaan terhadap gangguan keamanan.
6. Melaksanakan pembinaan peningkatan SDM terhadap Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Kepemimpinan sebagai bentuk dari kemampuan dari seorang pemimpin menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan perilaku bawahan guna mencapai tujuan organisasi memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk melakukan dan mewujudkan itu. Kepemimpinan yang berperan sebagai agen perubahan terhadap perilaku dan sikap bawahan yang pada akhirnya

berdampak kepada peningkatan kinerja organisasi harus mampu menghadapi dan memahami adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok organisasi.

Keberhasilan pengembangan suatu desa dan peningkatan Kinerja Aparatur tentu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kepala Desa sebagai orang nomor satu di pemerintahan desa, menjadi seorang kepala desa tidak cukup hanya mengandalkan kekuasaannya dalam menjalankan pemerintahan desa, namun dibutuhkan sosok yang mampu mengerakan seluruh elemen desa untuk bersama bersinergi membangun desa.

“Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Slamet yang merupakan kepala dusun di desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa kepala desa ini jarang berada di kantor desa, apabila ada warga yang ingin mengurus surat atau memiliki keperluan dengan beliau dihubungi lewat handphone, kemudian barulah warga tersebut datang kerumahnya, untuk kepemimpinan beliau ini saya sendiri belum puas, masih banyak yang belum maksimal.”⁶⁰

Sehingga kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu memerankan diri sebagai actor yang berpengaruh bagi bawahannya dalam hal peningkatan prestasi kerja seperti memberikan ruang bagi bawahan untuk melakukan inovasi dan memberikan kewenangan kepada bawahan untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan dapat menjadi contoh bagi bawahan dalam berprestasi dan perilaku.

Kinerja merupakan hasil kerja baik dilihat dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya yang telah dicapai target pegawai/aparatur, dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan organisasi, dan hasil

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Slamet selaku Kepala Dusun Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerjanya tersebut disesuaikan dengan hasil kerja yang diharapkan organisasi atau dinas dengan melalui kriteria-kriteria dan standar kinerja pegawai yang berlaku dalam organisasi. Menurut Bacal dalam Masana menyatakan bahwa sukses dan kurang suksesnya organisasi dalam mencapai hasil kerja dikelompokkan dalam dua faktor, yakni faktor individu dan faktor sistem:

Faktor individual adalah semua faktor yang bersumber dari diri pegawai termasuk pimpinan. Contohnya tingkat memotivasi, komitmen, keahlian, dan pengetahuan. Faktor individu juga sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seseorang. Setelah melihat faktor individu ini dalam menjalankan tugas pelayanan publik di kedua Desa, peneliti mewawancarai Sekretaris Desa mengenai Perangkat Desa yang ditetapkan dan menjalankan pemerintahan Desa Kota Kandis Dendang maupun Desa Jati Mulyo.

“hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak Husaini, S.Pd yang merupakan sekretaris Kantor Desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa di kantor desa ini selama 3 tahun belakangan ini memiliki Aparat Desa sebanyak 10 orang, dimana yang berpendidikan SMA/SMK Sederajat ada 9 orang dan 1 orang berpendidikan S1, untuk masalah pendidikan di kantor desa ini lebih didominasi oleh tamatan SMA sederajat, namun untuk kinerja mereka tidak kalah yakni sama-sama cekatan.”⁶¹

Faktor-faktor sistem yaitu semua faktor yang berada dan bersumber di luar kendali para pegawai secara individual. Contohnya prosedur kerja yang buruk, organisasi yang gemuk, komunikasi yang buruk, prasarana dan saran yang kurang memadai. Seperti berkembangnya zaman, maka pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat, maka diperlukan adanya penambahan Sarana maupun

⁶¹ Wawancara dengan bapak Husaini Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang, 6 Maret 2022.

Prasarana kantor untuk mendukung kerja dari aparatur dalam melayani masyarakat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003⁶² tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik khususnya pada prinsip Pelayanan Publik poin 7 masalah Kelengkapan Sarana dan Prasarana. Menurut Pak Haryanto selaku Sekretaris Desa Jati Mulyo mengatakan bahwa:

“hal tersebut diungkapkan oleh bapak Haryanto yang merupakan sekretaris kantor desa Jati Mulyo mengatakan bahwa untuk Aparatur Desa Jati Mulyo ini berjumlah 9 orang, yang berpedidikan SMA/SMK Sederajat 8 orang, dan yang berpendidikan S1 berjumlah 1 orang. Sedangkan untuk masalah sarana dan prasarana di Kantor Desa Jati Mulyo ini sudah cukup memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti computer/laptop setiap aparatur memiliki semua, Printer 2 buah, kursi dan meja yang cukup dan masih layak pakai, wifi yang menunjang internet karna disini masih kesulitan sinyal internet yang lelet, kemudian kantor desa yang baru di perbaiki menjadi lebih nyaman, diharapkan aparatur dapat merawat dan menjaga prasana yang ada ini”⁶³.

Kemudian terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan kinerja pegawai atau aparatur di kantor desa Kota Kandis Dendang dan Jati Mulyo, yakni kedisiplinan pegawai Kantor Desa, disiplin kantor desa ini bila dikembangkan serta diterapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen akan sangat berdampak positif bagi para pegawai. Selain itu, disiplin mendorong agar para aparatur bekerja dengan konkrit melakukan hal-hal yang lurus dan benar. Dengan memberlakukan disiplin ini dapat berdampak pada lingkungan yang baik sehingga muncul kesinambungan dari dalam hubungan dengan orang lain. Hal yang dianggap sepele namun sangat penting, sehingga sering menjadi salah satu kendala yang dihadapi karena belum begitu optimal dalam pelaksanaan dan

⁶² Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003

⁶³ Wawancara dengan bapak Haryanto Sekretaris Desa Jati Mulyo, 7 Maret 2022.

penerapannya. Peneliti mewawancarai salah satu masyarakat desa yaitu ibu Sri ia mengatakan bahwa:

“hal tersebut diungkapkan oleh ibu Sri yang merupakan salah satu masyarakat desa Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa Seringkali yang ditemui saat berada di tempat yang bertugas hanya sekretaris desa, dan kepala desa tidak ada ditempat sehingga saya harus menunggu kepala desa pulang dalam pengurusan surat yang membutuhkan tanda tangan kepala desa, kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di kantor desa yang memiliki tugas penting serta sebagai contoh untuk para bawahannya, seharusnya lebih disiplin, serta bertanggung jawab akan pekerjaannya, belum lagi untuk sarana di kantor masih cukup minim dimana Printer yang hanya ada 1 buah, sehingga cukup lama jika tugas menumpuk untuk memerlukan print, sedangkan akses keluar dari Desa cukup jauh perjalanan dan masih minim tempat fotocopyan”.⁶⁴

Jika dilihat dari data yang peneliti ambil dari wawancara di atas, menurut peneliti kendala dalam mencapai kinerja Desa Kota Kandis yakni Sarana dan Prasarana yang masih kurangnya printer dan Kepala Desa yang sulit untuk ditemui. Bukan hanya itu peneliti pun cukup sulit untuk menemui Kepala Desa Kota Kandis Dendang untuk di mintai data wawancara mengenai kinerja aparatur desa. Menurut peneliti disini dalam kepemimpinan sebagai bentuk dari kemampuan seorang pemimpin adalah menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan perilaku bawahannya guna untuk mencapai tujuan organisasi memerlukan pendekatan tertentu untuk melakukan dan mewujudkan itu.

Seperti hal nya saat peneliti melaksanakan observasi dan penelitian di Kantor Desa Kota Kandis Dendang kurangnya partisipasi dari pihak aparatur desa, sulitnya memberikan data yang dibutuhkan, serta kepala desa yang sulit untuk

⁶⁴ Wawancara dengan ibu Sri masyarakat Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

ditemui. Sehingga aparatur pemerintahan desa belum begitu professional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“hal ini diungkapkan oleh bapak Suwito yang merupakan Kepala Badan Pengawas Desa (BPD) Kota Kandis Dendang mengatakan bahwa kepala desa disini masih kurang bertanggung jawab dengan tugasnya, sulitnya apabila ditemui dilihat sekarang tidak ada kemajuan dalam kepemimpinannya Para aparatur desa masuk tidak tepat waktu yang ditentukan yang mana mereka masuk waktu siang dan tidak menentu jamnya, tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sudah sering ditegur namun masih belum ada Nampak perubahan dari kepala desa ini”⁶⁵

Jika dilihat dari wawancara ini para aparatur desa seharusnya datang tepat waktu yang seharusnya menjalankan sesuai dengan Prosedurnya yakni berdasarkan MENPAN Tahun 2003. Dalam hal ini perlunya peningkatan kerja dalam pelayanan public yang pertama yakni profesionalisme aparat pelayanan public, unsur yang menentukan dalam memberikan pelayanan prima yakni sumber daya manusia. Untuk itu perlu ditetapkan sistem rekrutmen, persyaratan atau kriteria, serta pembinaan sumber daya manusia, agar diperoleh petugas pelayanan public yang professional, amanah, jujur, dan akuntabel. *Kedua*, organisasi sarana dan prasarana, serta prosedur atau sistem kerja. Organisasi pelaksanaan pelayanan public harus sederhana dengan tanggung jawab setiap unit dan tidak tumpang tindih, sistem kerja atau prosedur yang sederhana, transparan, akuntabel, dan partisipatif. *Ketiga*, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pelayanan public. Peningkatan fungsi ini untuk menjamin efektifitas penyelenggaraan dan mutu. Dan terakhir partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public agar terwujudnya keterbukaan antara aparatur desa dengan masyarakat ataupun kepala desa dengan aparaturnya.

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Suwito selaku Kepala Badan Pengawas Desa (BPD) Desa Kota Kandis Dendang, 4 Maret 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem kerja di Desa Kota Kandis Dendang dan Desa Jati Mulyo tidak memiliki perbedaan spesifik, dapat dilihat dari SOP yang ada yakni untuk sistem kerja aparatur desa disini seperti halnya pada umumnya yakni dan pakaian pun sesuai yang ditentukan tidak diperbolehkan memakai baju bebas, begitupun dengan desa Kota Kandis Dendang.
2. Kinerja dari kedua aparatur desa dapat dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas:
 - a. Desa kota Kandis Dendang dalam produktivitas kurangnya peran dari kepala desa Kota Kandis Dendang dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa terkait penyelenggaraan administrasi desa, responsibilitas aparat yang cukup baik yang dilihat dari kecekatan dalam menyelesaikan tugasnya, berkomunikasi dengan baik dan sopan terhadap masyarakat, ketepatan melayani masih kurang dilihat dari tidak mampu menyelesaikan administrasi sesuai waktu yang telah ditentukan karena terhambat dengan sarana dan prasarana yang minim. Responsivitas aparat desa masih perlu adanya perbaikan dalam dengan pelayanan yang cukup baik maka perlu diimbangi dengan sikap disiplin terhadap waktu, yakni sesuai SOP yang berlaku. Kemudian akuntabilitas kepala desa yang menjadi tolak ukur dan

sebagai pemimpin yang dapat dicontoh para aparatur masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik.

- b. Desa Jati Mulyo dengan indikator diatas sudah dikatakan baik, dengan responsivitas yang ramah, dan ketepatan penyelesaian sesuai waktu yang ditetapkan, dengan kecepatan dan ketanggapan para aparatur serta peran kepala desa yang disiplin dan tegas terhadap para aparaturnya.
3. Faktor penghambat/kendala dalam mencapai kinerja aparatur desa terdapat beberapa faktor seperti prosedur kerja yang buruk, organisasi yang gemuk, komunikasi yang buruk, prasarana dan saran yang kurang memadai, untuk desa Kota Kandis Dendang kendala seperti kurangnya disiplin aparatur desa yang masuk jam kerja tidak tepat waktu yang ditentukan, kurang nya sarana dan prasarana dalam menunjang kerja para aparatur sehingga proses pelayanan kurang optimal. Desa Jati Mulyo seperti faktor individu yang terkadang muncul yakni rasa malas dalam diri para aparatur dikarenakan kurangnya reward dan apresiasi yang diberikan kepada aparatur desa.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yakni:

1. Untuk pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa agar dapat ditingkatkan agar meningkatkan kinerja yang ingin dicapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terselenggaranya pemerintahan yang baik dan sistem kerja yang harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Untuk masyarakat dari kedua desa dapat selalu mendukung serta memberikan masukan yang membangun, untuk kepala desa sebagai contoh dalam meningkatkan produktivitas kinerja aparatur desa terdapat beberapa faktor yakni faktor individu, faktor tim atau organisasi dan faktor kepemimpinan itu, dengan adanya faktor kepemimpinan maka terdapat dorongan, masukan serta bimbingan kepada pegawai dalam bekerja. panutan yang baik bagi para pegawai untuk lebih diperbaiki lagi dalam disiplin waktu, serta reward dan sanksi peneliti rasa sangat perlu dalam mencapai target kinerja yang baik.
3. Dalam peningkatan kinerja perlu dilihat dari faktor eksternal seperti pengawasan SDM, sarana dan prasarana dan internal yang berkaitan dengan proses manajemen kerja, aparatur desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus bisa untuk menerima segala macam masukan, dan kritikan serta saran yang bersifat positif, agar tercapainya target kinerja yang diinginkan. disiplin waktu yang harus para aparatur perbaiki agar kinerja berjalan optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ambar Teguh Sulistiyani dan Risodah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Bintoro dan Daryanto, *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Edi Darmawi, *Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Prespektif Good Governance*, Seluma: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 2014, Vol 3 No 2.

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Makasar: Garis Khatulistiwa, 2020

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Profil Desa Peduli Gambut, Desa Kota Kandis Dendang Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Profil Desa Peduli Gambut, Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi

Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama Eresco, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D"*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan RNB*, Bandung: Alfabeta, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Pasal 120 ayat (2) tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang desa

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2006, Pasal 8 ayat 3

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

C. Journal

Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Indonesia: Jurnal Keperawatan Indonesia, 2007, Vol. 11 No. 1.

Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo, *Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Malang: Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4

Mimi Asliani, *Efektivitas Kinerja Aparatur Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha (Studi Kasus di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sarlangun)*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN JAMBI, 2016.

Mochtar Mas'ood & Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2008

Reski Wahdani, Skripsi, *Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021.

Solatiyah, *Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Studi di Desa Seling Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN JAMBI, 2020

Syaikhul Falah, Klara Wonar, dan Pangayow, *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity sebagai Variabel Moderasi*, Jurnal Akuntansi, , 2018, Vol. 1 No. 2.

Widodo, *Pengaruh antara Lingkungan Kerja dengan Kepuasan Kerja*, USU Library, 2005.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 812 /D.II.1/PP.00.11/2/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 18 Februari 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Jati Mulyo
Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Fibri Agusti Ningsih
NIM : 105180182
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kinerja Aparatur Desa (Studi Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Jati Mulyo Kec.Dendang Kab. Tanjabtim Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 18 Februari 2022 -- 18 April 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 812 /D.II.1/PP.00.11/2/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 18 Februari 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Kota Kandis
Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Fibri Agusti Ningsih
NIM : 105180182
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Kinerja Aparatur Desa (Studi Desa Kota Kandis dan Desa Jati Mulyo Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kota Kandis Kec.Dendang Kab. Tanjabtim Provinsi Jambi
Waktu Penelitian : 18 Februari 2022 – 18 April 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Dekan
Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Samsi, M.A., M.I.R., Ph.D.
0817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN 1

DAFTAR INFORMAN

1	Husaini, S.Pd	Sekretaris Desa Kota Kandis Dendang
2	Suwito	Ketua Permusyawaratan Desa
3	Sri	Masyarakat Desa Kota Kandis Dendang
4	Slamet	Kepala Dusun Desa Kota Kandis Dendang
5	Suyoto	Kepala Desa Jati Mulyo
6	Haryanto	Sekretaris Desa Jati Mulyo
7	Riyanto	Kepala Dusun Desa Jati Mulyo
8	Suwijo	Masyarakat Desa Jati Mulyo
9	Sumiati	Masyarakat Desa Jati Mulyo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana standar dari dasar pedoman pelayanan di desa ini?
2. Bagaimana dengan prosedur pelayanan yang ada di kantor desa?
 - a. Apakah prosedur ini baku untuk semua orang?
3. Bagaimana sistem kerja dari aparatur desa Kota Kandis/jati mulyo?
4. Jam berapakah operasional kerja di kantor desa ini di mulai?
 - a. Apakah sesuai dengan waktu yang ditentukan?
 - b. Apakah aparatur desa sudah disiplin dalam menjalankan tugasnya?
5. Bagaimana dengan kepastian waktu pelaksanaan pelayanan di kantor desa kota kandis/jati mulyo ini?
 - a. Apakah sesuai atau sering terlambat dalam penyelesaiannya?
6. Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam pelayanan kerja di kantor desa?
7. Bagaimana dengan tingkat pendidikan dari aparatur yang ada di desa ini?
 - a. Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada di kantor desa?
 - b. Apakah tugas kerja yang dilaksanakan para aparatur sudah sesuai dengan tugas dan fungsi kerja?
8. Apa saja faktor penghambat dalam mencapai target kinerja di desa ini?
9. Apa strategi kepala desa untuk mengatasi hambatan itu?
10. Kemudian apa saja prestasi yang diperoleh leh desa ini?

MASYARAKAT

1. Apakah aparatur desa sudah menunjukkan tanggung jawabnya dengan maksimal dalam pelayanan?
2. Bagaimana respon aparatur dalam melayani masyarakat yang datang?
3. Apa saja pelayanan yang diberikan di kantor desa ini?
4. Apakah aparatur tersebut siap tanggap dalam memberikan pelayanan?

Lampiran 3

DOKUMENTASI RISET

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	
<p>Gambar 5. Kantor Desa Jati Mulyo</p>	<p>Gambar 6. Kantor Desa Kota Kandis Dendang</p>
	
<p>Gambar 7. Wawancara bersama Sekretaris Desa Jati Mulyo</p>	<p>Gambar 8. Wawancara bersama Kepala Desa jati Mulyo</p>
	
<p>Gambar 9. Masyarakat di Desa Jati Mulyo</p>	<p>Gambar 10. Wawancara bersama sekretaris Desa Kota Kandis Dendang</p>
	
<p>Gambar 7. Wawancara bersama masyarakat desa Jati Mulyo</p>	<p>Gambar 8. Wawancara bersama masyarakat desa Kota Kandis Dendang</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Gambar 9. Aparatur Desa Jati Mulyo



Gambar 10. Aparatur Desa Kota Kandis Dendang



Gambar 11. Stuktur organisasi



Gambar 12. Kantor Desa Jati Mulyo

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Fibri Agusti Ningsih

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 31 Agustus 2000

NIM : 105180182

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Golongan Darah : O

Alamat : Perumahan Nirwana Blk A No.04

No. HP : 082210622044

Alamat Email : febrianingsih408@gmail.com

Nama Ayah : Supono

Nama Ibu : Sri Wulan

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tempat	Tahun
1	SD N 95/X Rantau Indah	Rantau Indah	2006-2012
2	SMP N 30 Tanjung Jabung Timur	Rantau Indah	2012-2015
3	SMA N 4 Tanjung Jabung Timur	Sido Mukti	2015-2018